

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini diketahui WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pertama kali ketika menyerang Wuhan pada Desember 2019 lalu (WHO, 2021). Karena penyebarannya yang sangat cepat, virus ini kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO secara resmi pada Maret 2020. Bahkan hingga saat ini pandemi ini masih belum sepenuhnya mereda. Hal tersebut tentunya membuat negara-negara yang terdampak berada dalam kepanikan serius, sebab pandemi tersebut telah membawa masalah kritis pada berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun politik suatu negara. Sehingga mengharuskan tiap-tiap negara untuk dapat mengubah ataupun membuat kebijakan-kebijakan baru guna penanggulangan pandemi COVID-19. Perumusan serta pengimplemetasian kebijakan-kebijakan guna penanggulangan pandemi tentunya membutuhkan suatu proses persepsi oleh pemerintah, yakni sekuritisasi.

Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional artinya merubah subjek menjadi suatu persoalan 'keamanan' oleh negara (Buzan, Ole, and Jaap, 1998). Subjek yang dimaksud adalah sebuah isu dalam studi keamanan baik tentang negara dan militer, maupun masalah ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Ketika sebuah isu sudah mencapai topik perbincangan, perundingan, hingga perdebatan pada level pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa isu tersebut merupakan sebuah ancaman keamanan bagi suatu negara. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 adalah subjek yang tersekuritisasi yang dianggap sebagai ancaman keamanan bagi masyarakat suatu negara, sehingga pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat menciptakan kesadaran umum akan dampak pandemi agar penanggulangannya dapat dilakukan secara efektif.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan komparatif dengan memilih dua negara sebagai fokus analisis, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Adapun alasan penulis memilih kedua negara yaitu sebagai berikut. *Pertama*, seperti yang kita tahu, Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua kekuatan besar dunia terpenting. Kekuatan besar merupakan sebutan untuk negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik serta militer yang hebat yang mampu mengerahkan kekuasaan dan pengaruhnya tidak hanya atas wilayahnya sendiri, namun juga diluar wilayah yang lain di dunia. Berdasarkan laporan dari *Lowy Institute Asia Power Index* edisi 2021, Amerika Serikat masih bertahan di posisi pertama sebagai negara *super power* dengan perolehan nilai sebesar 82,2. Sedangkan Tiongkok berada di posisi dua dengan perolehan nilai 74,6. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa untuk dapat masuk dalam kategori *super power*, sebuah negara harus dapat mencapai angka lebih dari sama dengan 70 point, sehingga dapat dikatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara kekuatan besar dunia dengan Amerika Serikat sebagai peringkat pertama dan Tiongkok sebagai peringkat kedua.

Kedua, Tiongkok dan Amerika Serikat tengah terlibat kontestasi dalam hal persaingan kekuatan. Adapun beberapa contoh kasusnya yaitu rivalitas keamanan di Laut China Selatan, persaingan ekonomi, serta perang dagang. Dengan ambisi Tiongkok yang sangat besar, mampu membawa peningkatan yang signifikan terhadap pengaruh kekuatan Tiongkok, terutama dalam hal kekuatan ekonomi. Hal tersebut semakin mempersulit Amerika Serikat dalam upaya strategi *rebalancing*. Pada kasus persaingan kekuatan, kedua negara menetapkan kebijakan luar negeri yang bersifat proteksionisme. Dimana proteksionisme merupakan pengetatan kebijakan ekonomi pada bidang perdagangan internasional dengan cara memberlakukan pajak, tata cara perdagangan, bea cukai, dan memberlakukan kebijakan-kebijakan perdagangan lainnya yang bertujuan untuk membatasi perdagangan antar negara serta membatasi masuknya barang-barang impor ke negara tersebut guna melangsungkan kehidupan perekonomian negara yang melakukannya (Sukirno, 2013). Pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping mencetuskan kebijakan perekonomian internasional yang diberi nama *Chinese Dream*, dimana

Chinese Dream merupakan kebijakan ekonomi internasional yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan masyarakat Tiongkok dengan dua tujuan utama yaitu menuju masyarakat madani pada tahun 2021 dan modernisasi pada tahun 2049. Kedua tujuan tersebut merupakan fundamental dari cita-cita partai komunis Tiongkok yang dikemukakan oleh presiden sebelumnya yaitu Hu Jintao. Xi Jinping menetapkan kebijakan *Chinese Dream* dalam tiga bidang, yaitu sektor ekonomi, politik dan militer. Dalam *Chinese Dream* terdapat dua hal penting yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) yang bertujuan untuk menciptakan kembali jalur sutera yang dapat meningkatkan perekonomian, dan militerisasi pulau-pulau pada kawasan Laut China Selatan. Sementara Amerika Serikat berupaya menguasai sektor perdagangan dengan memberlakukan kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* yang mengacu pada penguasaan sektor perekonomian dan stabilitas keamanan militer di kawasan Indo-Pasifik dan kawasan Laut China Selatan. Dalam penerapan kebijakan tersebut, Presiden Trump kerap melakukan kunjungan ke negara-negara di Asia guna mendorong kerjasama dengan berbagai negara untuk menjaga jalur laut yang bebas terbuka, perdagangan bebas, dan praktik pembiayaan infrastruktur yang transparan (Sitorus, 2021).

Pada tahun 2017, sektor ekonomi Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 6,9 persen. Hal tersebut membuat Amerika Serikat khawatir akan adanya penguasa ekonomi baru dalam kawasan Indo-Pasifik, terlebih sektor ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh sebesar 2,5 persen di tahun yang sama. Kemajuan industri Tiongkok dan kebijakan *Open-Trade Policy* menyebabkan banyak barang ekspor dan produk dari Tiongkok masuk ke wilayah Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian mengakibatkan banyaknya impor barang terhadap Amerika Serikat yang menyebabkan Amerika mengalami defisit. Kasus tersebut mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk menetapkan kebijakan proteksionisme terhadap Tiongkok dengan tujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dari pengaruh Tiongkok. Kebijakan tersebut diberlakukan pada sektor bea cukai barang impor, dimana setiap barang impor Tiongkok yang masuk akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25 persen. Hal tersebut tentunya berimbas pada perekonomian Tiongkok, dibuktikan dengan menurunnya jumlah penghasilan

eksport Tiongkok ke Amerika pada tahun 2018 sejak kebijakan ini ditetapkan hingga tahun 2020. Tiongkok pun melakukan hal yang sama sebagai bentuk balasannya terhadap Amerika Serikat dengan memberlakukan kebijakan proteksionisme terhadap barang impor Amerika Serikat dengan tambahan biaya yang sama yaitu sebesar 25 persen yang bertujuan untuk menekan kembali penurunan biaya yang didapat. Kasus tersebut menjadi awal mula terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (Sitorus, 2021).

Bahkan dimasa pandemi COVID-19, persaingan antara kedua negara tersebut tidak menunjukkan adanya kecenderungan mereda. Tiongkok dan Amerika Serikat terlibat saling tuduh serta adu propaganda terkait asal-usul dari virus COVID-19 yang kemudian berakibat pada pemotongan kontribusi pendanaan oleh Amerika Serikat untuk WHO pada bulan April setelah pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa WHO telah berada dalam kendali Tiongkok. Tidak hanya sampai disitu, persaingan kembali memanas dengan munculnya wacana penarikan keanggotaan diri Amerika Serikat dari WHO setelah Tiongkok memberi tambahan kontribusi sebesar 30 juta dolar Amerika pada WHO (Akhlil and Galby, 2020). Kesemua kasus tersebut dilakukan semata-mata karena kedua negara tengah memperebutkan posisi sebagai negara '*paling super power*'.

Ketiga, kedua pemimpin negara memiliki karakteristik yang sama yakni seorang yang ambisius dalam hal pencapaian kepentingan. Dalam hal ini, pemimpin negara yang dimaksud yaitu Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Adapun contoh sikap ambisiusnya yaitu ketika kedua pemimpin berupaya keras dalam mendapatkan pengakuan sebagai negara '*paling super power*' dengan melakukan tindakan nasionalis guna memajukan negaranya. Presiden Xi Jinping menciptakan kebijakan "*Chinese Dream*" yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan masyarakatnya, sementara Presiden Donald Trump memiliki visi-misi "*America great again*" yang bermakna Amerika yang makmur, hebat, dan berjaya dalam bidang apapun. Meskipun kedua negara tersebut memiliki status yang sama sebagai negara *super power* serta pemimpin negaranya memiliki satu kecenderungan yang sama dalam hal karakteristik, tentunya terdapat

perbedaan dalam hal pengambilan kebijakan luar negeri pada upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi komparasi terhadap kebijakan luar negeri kedua negara dalam upaya sekuritisasi COVID-19.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab yaitu bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Tiongkok dan Amerika Serikat dalam upaya sekuritisasi pandemi COVID-19. Argumen penulis adalah bahwa meskipun Pemerintah Tiongkok dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan luar negeri yang sama dalam upaya sekuritisasi pandemi COVID-19, namun mewujudkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada Tiongkok yang awalnya dipap sebagai negara episentrum pandemi membuktikan dirinya dengan menjadi negara pertama yang pulih dari pandemi COVID-19. Pada awal kemunculan pandemi COVID-19 di Tiongkok, pemerintah Tiongkok memberikan respon yang terbilang cepat dan tanggap melalui pernyataan resminya yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah ancaman nasional, hal tersebut disertai dengan penanganan intensif di berbagai sektor. Langkah awal yang dilakukan presiden Xi Jinping yaitu mengeluarkan kebijakan darurat berupa *lockdown* guna menghimbau warganya untuk tetap berdiam dirumah dan tidak berkumpul ditempat keramaian. Selain itu, kebijakan isolasi mandiri juga diberlakukan guna mencegah penyebaran virus ke luar daerah. Selanjutnya, dilakukan mobilisasi massa dengan tujuan untuk mengurangi intensitas epidemi dan memperlambat peningkatan jumlah kasus positif. Keberhasilan Tiongkok menjadi negara pertama yang pulih dari pandemi COVID-19 disebabkan pemerintahnya yang mampu beradaptasi dengan cepat dalam mengidentifikasi virus yang diwujudkan melalui penggunaan kapasitas medis, administratif dan politik yang efektif. Selain itu, dukungan dari rakyatnya melalui komitmen bersama yang kompak dalam menghadapi pandemi COVID-19 juga menjadi faktor keberhasilannya (Sari, 2020).

Sementara Amerika Serikat, justru menjadi negara dengan kasus positif terbanyak. Pemerintah Amerika Serikat dianggap abai dalam menangani pandemi COVID-19 dan lebih memfokuskan diri pada ekonomi (Wardhana, 2020). Pada

kasus pertama positif COVID-19 di Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat tidak langsung merespon dengan langkah preventif dan cenderung meremehkan serta mengabaikan potensi krisis yang akan ditimbulkan. Bahkan, sejak bulan Januari ketika COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, badan intelijen Amerika menyematkan topik pandemi secara berkala dalam pengarahannya yang diberikan kepada presiden Trump. Selain itu, menteri kesehatan Amerika, Alex Azar dengan cara pribadi juga memperingatkan Trump terkait kemungkinan pandemi. Namun, Trump masih mengabaikan peringatan tersebut dan tetap tidak mengambil tindakan apapun (Yong, 2020). Akibat keterlambatan respon tersebut, kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat tidak terkendali hingga mengakibatkan negara *super power* tersebut menjadi negara dengan positif COVID-19 terbanyak di dunia. Diperlukan waktu hingga dua bulan untuk pemerintah Amerika benar-benar menyadari akan dampak yang ditimbulkan COVID-19 dan memberlakukan kebijakan pembatasan sosial (Quinn, 2020).

Fokus penelitian ini yaitu pada kebijakan pembatasan yang dilakukan kedua negara. Penelitian ini akan dibatasi sampai pada saat kepemimpinan Trump serta sebelum ditemukannya vaksin.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana komparasi kebijakan luar negeri Tiongkok dan Amerika Serikat dalam upaya sekuritisasi COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Tiongkok dan Amerika Serikat dalam upaya sekuritisasi COVID-19. Kemudian membandingkan kebijakan luar negeri kedua negara tersebut dalam upaya sekuritisasi COVID-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok dan Amerika Serikat dalam upaya sekuritisasi pandemi COVID-19, menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas AMIKOM Yogyakarta, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pandangan terkait kebijakan luar negeri kedua negara dalam upaya sekuritisasi COVID-19 yang nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi penelitian berikutnya.

1.5. Sistematika Bab

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi, dalam rancangan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab sebagai pembuka serta pengantar dalam skripsi ini.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Bab

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka penelitian sebagai konstruksi dasar dalam mengembangkan penelitian ini.

- 2.1. Landasan Teori

2.2. Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai jenis metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan guna menunjang pembuatan penelitian yang relevan dan efisien.

3.1. Metode Penelitian

3.2. Teknik Pengumpulan Data

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan penelitian yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu.

4.1. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sekuritisasi COVID-19

4.2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Sekuritisasi COVID-19

4.3. Komparasi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Amerika Serikat dalam Upaya Sekuritisasi COVID-19

BAB V: PENUTUP

Merupakan kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian.